

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA
NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG
PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN,
DAN PECANDU NARKOTIKA KEDALAM LEMBAGA REHABILITASI
MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL**

UNIVERSITAS ANDALAS
(Studi Pengadilan Negeri Kls.I.B Bukittinggi)

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 selanjutnya disebut dengan UU Narkotika “zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.”

Narkotika pada umumnya digunakan oleh tenaga medis untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Pada dasarnya narkotika tidak berbahaya bagi kesehatan seseorang, namun sebaliknya bila digunakan melebihi dosis atau ukuran yang benar maka akan menimbulkan gangguan kesehatan si pemakai, bahkan

lebih fatal lagi mengakibatkan kematian, serta tidak stabilnya pertumbuhan tatanan kehidupan sosial di masyarakat.¹

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu penyebab diproduksinya berbagai macam jenis narkoba, seperti perkembangan komunikasi saat sekarang ini, terasa semakin mudahnya pendistribusian atau peredaran narkoba yang dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh indonesia.²

Dampak dari perkembangan tersebut, penyalahgunaan narkoba semakin marak terjadi, terutama dikalangan generasi muda di Indonesia yang pada umumnya masih produktif, situasi ini bisa disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orangtua, lingkungan yang tidak berpendidikan, pergaulan yang tidak sehat, dan kurangnya kesadaran serta lemahnya penegakan hukum. Selain itu, tindak pidana narkoba disebabkan karena para pengedar narkoba menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pengguna narkoba menjanjikan ketenteraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami oleh pengguna narkoba tersebut dapat hilang.³

Berikut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkoba oleh penyalahguna narkoba :

1. Faktor internal, yaitu hal-hal yang datang dari dalam diri pelaku penyalahguna narkoba, seperti jiwa yang goncang, rasa putus asa

¹Moh.Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, hlm. 89.

²*Ibid.*, hlm. 57-58.

³*Ibid.*, hlm. 6.

yang menyebabkan perlu adanya rasa ketenangan, keamanan, kenyamanan, sehingga perasaan-perasaan gelisah, putus asa, kegoncangan itu menjadi hilang.

2. Faktor eksternal, yaitu hal-hal yang datang dari luar diri yang bersangkutan, seperti pergaulan, pengaruh lingkungan, tekanan dari pihak-pihak tertentu.⁴

Kedua faktor tersebut dikarenakan tidak stabilnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, hal tersebut tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersama.⁵

Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan narkoba.

Dalam dasar menimbang UU Narkotika huruf c disebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. UU Narkotika telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi

⁴ *Ibid.*, hlm.92.

⁵ *Ibid.*

pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebelum undang-undang ini berlaku, pada UU Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen narkoba, sedangkan pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi selain merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain sekaligus merupakan korban.

Perlindungan hukum yang diberikan merupakan amanat dari UU Narkotika dimana dalam konsideran huruf b disebutkan “untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya kesehatan manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan”. Pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan penyalahguna dan pecandu yang sudah direnggut masa depannya dan para orangtua serta masyarakat harus selalu mengawasi perilaku pengguna atau pecandu setiap saat.⁶

Hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa *bijzondere leed* (penderitaan) yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.⁷

Penyalahguna narkoba dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan juga sebagai korban penyalahguna narkoba, karena orang tersebut

⁶*Ibid.*, hlm.7-8.

⁷P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16.

menyalahgunakan narkoba disebabkan faktor-faktor tertentu, disisi lain penyalahguna narkoba juga merasakan penderitaan fisik dan psikis dari penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya ketentuan UU Narkoba yang mengatur mengenai sanksi berupa hukuman maupun tindakan. Sanksi yang dimaksud dapat berupa hukuman yang diatur sesuai dengan Pasal 10 KUHP, misalnya dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba penyalahguna narkoba dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara.

Dalam Pasal 4 huruf d ketentuan umum UU Narkoba menjelaskan “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkoba”, selain Pasal 4 huruf d, pengaturan sanksi yang berupa tindakan rehabilitasi dapat dilihat dalam Pasal 54 UU Narkoba menjelaskan “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, serta Pasal 103 UU Narkoba berupa rehabilitasi bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba dalam kategori penyalahguna.⁸ Pasal-pasal ini diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 selanjutnya disebut dengan SEMA No 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. SEMA No 04 tahun 2010 menjelaskan batasan-batasan penyalahgunaan narkoba jenis tertentu dan hal-hal yang dapat menjadi

⁸ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.111.

pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa penyalahguna narkoba untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi.

Dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat pada Bab IX Pasal 50 ayat (1) tentang Putusan pengadilan menyatakan “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Faktanya, hakim dalam memutus perkara narkoba didominasi berdasarkan dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Dakwaan tersebut menggunakan pasal mengenai sanksi pidana penjara yang seharusnya tidak diberikan kepada penyalahguna narkoba. Sehingga hakim tidak berperan aktif dalam pembuktian terhadap pelaku tindak pidana narkoba.⁹ Seharusnya hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰

Berikut beberapa kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta amar putusan Hakim di Pengadilan Negeri Kls I.B Bukittinggi;

⁹ <http://youthproactive.com/speak-up/permasalahan-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 26 januari 2016.

¹⁰ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Op.Cit.*, hlm. 16.

1. Dalam putusan pidana NO.60/PID.B/2012/PN.BT. menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, sedangkan terdakwa hanya memiliki 1 (satu) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram (sisa 0,09 gram setelah dilakukan Labfor Cabang Medan).
2. Dalam putusan Pidana No.84/PID.B/2013/PN.BT. menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan terdakwa hanya memiliki 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal metamphetamine atau shabu dengan berat bruto 0,08 gram.
3. Dalam putusan Pidana Nomor: 10/Pid.B/2014/PN.BT. menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan terdakwa hanya memiliki 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening seberat kotor 0,3 (nol koma tiga) gram.

Berdasarkan kasus di atas, hakim perlu melakukan pertimbangan terhadap putusannya, seharusnya terdakwa hanya diberi tindakan berupa rehabilitasi, tidak dijatuhkan sanksi pidana penjara. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian

tentang dasar pertimbangan hakim terhadap penyalahguna narkotika dalam menjatuhkan putusan.

Dari latar belakang masalah di atas, maka untuk skripsi ini penulis memilih judul:

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA
NARKOTIKA DIHUBUNGAN DENGAN SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG
PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN,
DAN PECANDU NARKOTIKA KEDALAM LEMBAGA REHABILITASI
MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yang berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dihubungkan Dengan SEMA No 04 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri kls I.B Bukittinggi ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim tidak memberikan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika sehubungan dengan SEMA No 04 tahun 2010 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap penyalahguna narkoba.
2. Untuk dasar pertimbangan hakim tidak memberikan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba sehubungan dengan SEMA No 04 tahun 2010.

D. Manfaat Penelitian

1. Adapun manfaat teoritis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan memberikan informasi tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku penyalahguna narkoba dihubungkan dengan SEMA No 04 tahun 2010.
 - b. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama kuliah.
2. Adapun manfaat praktis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - a. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, bermanfaat bagi mahasiswa agar mereka mempunyai bekal yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pemahaman lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku penyalahguna narkoba dihubungkan dengan SEMA No 04 tahun 2010.

- b. Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori pembuktian

1. Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*)¹¹

Adalah pembuktian yang mana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakikatnya merupakan “peramuan” antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intim/conviction raisonce*). Dengan peramuan ini, substansi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) tentulah melekat adanya anasir prosedural dan tata cara pembuktian sesuai dengan alat-alat bukti sebagaimana limitatif

¹¹ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni, hlm 196.

ditentukan undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara materiel maupun secara prosedural.

b. Teori Pemidanaan

Guna mencari alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan, ada 3 (tiga) teori pemidanaan:¹²

1. Teori Absolut

Teori ini menyatakan bahwa dasar hukum dari pidana adalah yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Ini artinya, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan pidana. Pemberian pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga untuk menimbulkan nestapa bagi orang tersebut.

Tindakan pembalasan itu mempunyai 2 (dua) arah:

- a. Pembalasan subjektif, adalah pembalasan yang langsung ditujukan terhadap kesalahan orang itu, diukur dari besar kecilnya kesalahan.
- b. Pembalasan objektif, adalah pembalasan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, jika akibatnya kecil, maka pembalasannya kecil juga.

2. Teori Relatif

Menurut teori ini, dasar hukum dari pidana adalah menegakkan tata tertib masyarakat, dimana tata tertib masyarakat itu merupakan

¹²P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia* edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 13.

tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana. Ini berarti pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah adanya kejahatan. Menurut teori ini pencegahan ada 2 (dua) macam:

a. Pencegahan umum (*generale preventive*)

Sampai pada revolusi Prancis, orang menganggap daya pencegahan umum dari pidana terletak pada cara melaksanakannya. Daya pencegahan umum dari pidana dilaksanakan melalui cara yang menakutkan masyarakat yaitu dengan melaksanakan pidana didepan umum. Anselm Von Feubach pada tahun 1800 menciptakan teori “tekanan psikologis” pidana yang diancamkan menimbulkan tekanan di alam pikiran, sehingga ia akan melakukan kejahatan.

b. Pencegahan Khusus (*speciale preventive*)

Menurut Van Hamel dinyatakan bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan.¹³

3. Teori Gabungan

Teori ini digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan:

1. Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan disini dibatasi oleh penegakan tata tertib hukum, artinya pembalasan hanya

¹³ *Ibid.*, hlm 17.

dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakkan tata tertib hukum.

2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan, didalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, itu perlu diberi batasan, bahwa nestapanya harus sesuai dengan perbuatannya. Apabila pencegahan umum tidak berhasil digunakan, barulah pencegahan khusus yang terletak pada menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat ia tidak berdaya lagi.

3. Titik pangkal permasalahan dan keharusan melindungi masyarakat, dalam hal ini Vos berpendapat:

“Bahwa daya menakut-nakuti itu terletak pada pencegahan umum dan ini idak hanya pencegahan saja, juga perlu dilaksanakan”.

Pecegahan khusus yang berupa memperbaiki dan membuat tidak berdaya lagi, mempunyai arti penting, Vos berpendapat lagi:

“Hal ini sesungguhnya sudah tidak layak lagi dalam arti yang sesungguhnya, meskipun sebetulnya apabila digabungkan antara memperbaiki dan membuat tidak berdaya itu merupakan pidana sesungguhnya”.¹⁴

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini, disamping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

defenisi-defenisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu:

a. Dasar

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan), asas.¹⁵

b. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan adalah pemikiran tentang sesuatu mengenai baik dan buruknya suatu keputusan.¹⁶ Hakim berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Butir 8 yaitu :

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh negara untuk mengadili.”

Sedangkan pengertian Hakim berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman Pasal 1 butir 5 yaitu :

“Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

c. Putusan Pemidanaan

¹⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA (KBBI) edisi kedua, Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Balai Pustaka, hlm 211.

¹⁶ Kamus Umum Bahasa Indonesia, 2006, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1274.

Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Van Bemmelen merumuskan putusan pemidanaan adalah *Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het te laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar acht* (putusan pemidanaan dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).¹⁷

d. Penyalahguna Narkotika

Menurut Bab I ketentuan umum Pasal 1 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

e. SEMA Nomor 04 Tahun 2010

Adalah Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

F. METODE PENELITIAN

¹⁷ Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 263-264.

1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan terhadap efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau instansi hukum dalam penegakan hukum.¹⁸ Pembahasan dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan dan gejala kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala sosial dalam masyarakat.¹⁹ Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam suatu tindak pidana. Dalam memutus suatu perkara pidana Narkotika diharapkan seorang hakim dapat menjalankan tugas dan memutus perkara dengan baik, juga memperhatikan peraturan-peraturan lain untuk menindak siterdakwa serta hakim dapat mempertimbangkan sanksi yang sesuai dengan keadaan siterdakwa dalam sidang pengadilan.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹⁸Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hlm. 88.

¹⁹ Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25.

Data diperoleh dari penelitian langsung di Pengadilan Negeri kls I.B Bukittinggi. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang dikumpulkan dilapangan.²⁰ Data primer diperoleh melalui teknik wawancara yang dilakukan Pengadilan Negeri kls I.B Bukittinggi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yakni, data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yaitu data yang didapat dari bahan-bahan yang mengikat seperti Undang-undang sebagai landasan yuridis dan bahan yang memberikan penjelasan seperti hasil penelitian, karya ilmiah dan pendapat ahli. Data sekunder digunakan sebagai penambahan data primer dan data tersier. Sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).²¹

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

²⁰Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

²¹ *Ibid.*

Dalam melaksanakan penelitian kepustakaan ini diperoleh bahan hukum berupa data sekunder yaitu data yang telah terolah atau telah disusun yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan, mempelajari Undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini.

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
- b) Undang-undang tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009,
- c) Undang-undang kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009,
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²²

c. Bahan hukum tersier

²² Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 144.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan kamus Umum Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:²³

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*” yaitu teknik untuk membuat kesimpulan dengan obyektif dan sistematis, meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa berkas perkara maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang terkait dengan objek penelitian dalam putusan pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkoba.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Metode yang dipergunakan untuk menentukan jumlah

²³Bambang Sungkono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 112.

responden adalah *purposive sampling* yaitu jumlah responden yang ditentukan dianggap dapat mewakili responden lainnya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sumber informasi yang diwawancarai adalah hakim yang memutus perkara pidana terhadap penyalahguna narkoba.²⁴

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing*,²⁵ yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka dilakukan analisis secara kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

²⁴ Soerjono Sukanto, *Op.Cit*, hlm. 21-22.

²⁵ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 47.

Berdasarkan pada kepustakaan yang ada dan kenyataan dalam praktek, pemilihan kepada pendekatan kualitatif selalu berdasarkan atas ciri-ciri yang menonjol dari data yang telah terkumpul.²⁶



²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 77.